

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber buku:

- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014.
- Amrah Muslimin. *Aspek-Aspek Hukum Pemerintahan Daerah*, Alumni, Bandung, 1986.
- Akhmad Khairuddin. *Fenomena Keadilan dalam Otonomi Daerah dalam Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*, Yayasan Obor. Jakarta, 2010.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2005.
- Bhenyamin Hoessain. *Perubahan Model, Pola dan Bentuk Pemerintahan Daerah: Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi*. Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.
- Imade Pasek Diartha, *Metodologi penelitian hukum Normatif dalam justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Irwan Sudjito. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1990.
- Joko Prakoso. *Kedudukan dan Fungsi Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Lanilla didalam Undang-Undang Pokok Pemerintahan Di Daerah*, Ghalia Indah, Jakarta, 1984.
- Jonaedi Effendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Laica Marzuki. *Berjalan-jalan Di Ranah Hukum*. Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Irwan Sudjito. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1990,
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.
- Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

\_\_\_\_\_, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*. UII Press. Yogyakarta, 2010.

Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Robert J. Kodoatie, *Pengantar Manajemen Infrastruktur*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

The Liang Gie. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1967.

Sadu Wastiono, dkk. *Memahami Asas Tugas Pembantuan*, Fokus Media. Bandung, 2006.

## **B. Peraturan perundang undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah.

Undang-Undang Nomor 22 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 14 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

### **C. Sumber Lain**

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/09/061000865/benarkah-virus-corona-penyebab-covid-19-berasal-dari-pasar-wuhan>.

<https://www.suara.com/health/2020/04/04/183648/dari-china-begini-cara-penyebaran-virus-corona-ke-seluruh-dunia>

<https://humas.bandung.go.id/berita/ini-pengertian-karantina-yang-dikenal-di-indonesia>

<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/01/14044881/begini-mekanisme-penerapan-pembatasan-sosial-berskala-besar>

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200312075307-4-144247/who-nyatakan-wabah-covid-19-jadi-pandemi-apa-maksudnya>

<http://p2p.kemkes.go.id/sosialisasi-undang-undang-nomor-6-tahun-2018-tentang-kekarantinaan-kesehatan>.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Otonomi\\_daerah](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah).

BEN, Medcom (2020-03-31). "Apa Yang Boleh dan Tidak Boleh di Saat PSBB". *Medcom.id*. Diakses tanggal 25/7/2020 pukul 07.00 WIB.

<https://lifestyle.bisnis.com/read/20200318/106/1215198/kenali-jenis-karantina-kesehatan-berdasarkan-undang-undang>.

<https://ayobandung.com/read/2020/04/19/86499/peraturan-wali-kota-jadi-landasan-sanksi-pelanggar-psbb-di-bandung>.